

Menyukkseskan Strategi dan Kebijakan Polri dalam Renstra 2025–2029

Oleh: Tim CSP---Center for Strategic Policing

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki periode strategis baru dengan disahkannya Rencana Strategis (Renstra) Polri 2025–2029. Dokumen ini bukan sekadar rencana kerja, melainkan arah kebijakan dan strategi besar dalam menjawab tantangan keamanan nasional di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks. Polri dituntut tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mampu bertransformasi mengikuti dinamika global yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital, meningkatnya kejahatan transnasional, serta tingginya ekspektasi publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan multidimensional. Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti *cybercrime*, penipuan daring, serangan siber terhadap infrastruktur penting, hingga penyebaran

disinformasi yang berpotensi memicu instabilitas sosial. Di sisi lain, kasus-kasus narkoba lintas negara, radikalisme, hingga konflik horizontal masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan sistematis.

Dari perspektif internal, Polri menghadapi dinamika kepercayaan publik yang fluktuatif. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dapat menurun tajam ketika terjadi kasus besar yang melibatkan oknum aparat. Fenomena ini mempertegas kebutuhan reformasi kultural dan institusional yang konsisten, agar Polri tidak sekadar kuat secara struktural, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral di mata publik.

Dalam kerangka pembangunan nasional menuju *Indonesia Emas 2045*, keberadaan Polri menjadi salah satu pilar utama yang memastikan stabilitas keamanan. Tanpa stabilitas, pembangunan ekonomi, sosial, dan politik sulit berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, Renstra Polri 2025–2029 menegaskan visi untuk membangun institusi kepolisian yang **Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)**, berintegritas, serta dipercaya publik.

Namun, keberhasilan implementasi Renstra tidak semata bergantung pada Polri sebagai institusi, melainkan juga pada dukungan masyarakat, sinergi dengan lembaga negara lain, serta pengawasan publik yang sehat. Artikel ini berupaya mengulas arah kebijakan, strategi pencapaian, tantangan, hingga langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyukseskan Renstra Polri 2025–2029, sehingga

dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi Polri.

B. Arah Kebijakan Polri 2025–2029

Renstra Polri 2025–2029 menegaskan arah kebijakan yang berorientasi pada transformasi kelembagaan. Salah satu prioritas utama adalah **transformasi digital**, di mana Polri berkomitmen mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam setiap lini pelayanan publik maupun penegakan hukum. Penggunaan *big data*, kecerdasan buatan (AI), hingga *command center* digital diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan. Di sisi lain, digitalisasi layanan publik – seperti pengelolaan SIM, SKCK, maupun pelaporan perkara – dirancang untuk memangkas birokrasi panjang sekaligus menekan ruang praktik pungutan liar.

Kebijakan penting lainnya adalah **penguatan integritas**. Polri menyadari bahwa fluktuasi kepercayaan publik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku oknum aparat. Oleh karena itu, pembenahan kultur organisasi ditempatkan sebagai agenda besar, dengan menekankan nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi ini tidak hanya menyentuh sistem pengawasan internal, tetapi juga membuka ruang pengawasan eksternal agar masyarakat dapat ikut serta menilai kinerja Polri secara objektif.

Dalam konteks menghadapi ancaman kontemporer, Polri juga mengarahkan kebijakan pada **modernisasi peralatan dan teknologi**. Perangkat keamanan mutakhir, laboratorium forensik digital, hingga sarana komunikasi taktis menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan kejahatan siber, terorisme, narkoba lintas negara, serta ancaman terhadap infrastruktur vital. Modernisasi ini tidak boleh hanya terpusat di perkotaan besar, tetapi juga menjangkau wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sering menjadi titik rawan keamanan.

Selain itu, Polri menempatkan **kemitraan publik dan kolaborasi multi-sektoral** sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan strategis. Melalui pendekatan *community policing*, Polri mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Forum komunikasi polisi-masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil dipandang sebagai modal sosial yang kuat dalam menciptakan rasa aman kolektif.

Terakhir, arah kebijakan Polri diarahkan pada **fokus keamanan strategis dan peningkatan pelayanan publik**. Penanggulangan kejahatan transnasional seperti narkoba, perdagangan manusia, dan radikalisme ditempatkan sebagai prioritas nasional. Di saat yang sama, Polri dituntut hadir lebih cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan—mulai dari penanganan kasus darurat hingga mekanisme pengaduan yang transparan. Kecepatan respons inilah yang diyakini akan menjadi

salah satu ukuran utama dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dengan lima arah kebijakan besar ini, Renstra Polri 2025–2029 pada hakikatnya berupaya menegaskan bahwa transformasi institusi bukan hanya soal membangun kekuatan struktural, tetapi juga membangun kepercayaan sosial. Polri tidak lagi semata hadir sebagai penegak hukum, melainkan sebagai mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

C. Strategi Pencapaian

Arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Renstra Polri 2025–2029 hanya dapat berhasil jika ditopang oleh strategi pencapaian yang tepat. Polri menyadari bahwa perubahan tidak cukup diwujudkan dengan instruksi formal, melainkan harus dijalankan melalui langkah-langkah sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Strategi pertama adalah **penguatan sumber daya manusia (SDM)**. Aparat kepolisian merupakan ujung tombak yang menentukan wajah institusi di mata publik. Karenaitu, pendidikan dan pelatihan diarahkan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada integritas, empati, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Rekrutmen berbasis merit dan peningkatan kompetensi digital di seluruh level kepolisian menjadi kunci agar Polri siap menghadapi tantangan era 5.0.

Strategi kedua adalah **pemanfaatan teknologi modern secara berkelanjutan**. Polri perlu mengembangkan sistem digital yang terintegrasi, mulai dari aplikasi layanan publik, database kriminal nasional, hingga pusat komando berbasis *real-time data*. Kehadiran patroli siber yang berfungsi mencegah penyebaran hoaks, radikalisme daring, dan kejahatan digital lainnya menjadi bentuk nyata dari strategi ini. Dengan teknologi, Polri dapat bersikap lebih prediktif dalam menjaga keamanan masyarakat.

Strategi ketiga adalah **kolaborasi multi-sektor**. Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi kompleksitas ancaman keamanan. Sinergi dengan TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, bahkan sektor swasta dan akademisi sangat diperlukan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data, operasi bersama, hingga riset kebijakan keamanan. Dengan jaringan kerja yang luas, Polri dapat memperkuat kapasitasnya sekaligus memperkecil potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Strategi keempat adalah **reformasi struktural dan kultural**. Perubahan struktural diarahkan pada penyederhanaan birokrasi agar pelayanan lebih cepat dan efisien, sementara reformasi kultural menyentuh aspek mentalitas aparat agar lebih humanis, transparan, dan proaktif. Transformasi ini menjadi penting mengingat akar persoalan kepercayaan publik seringkali berasal dari interaksi langsung antara aparat dan masyarakat di lapangan.

Strategi kelima adalah **pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis**. Melalui pendekatan *community policing*, Polri mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menciptakan keamanan lingkungan. Forum kemitraan polisi dan masyarakat, pelibatan tokoh agama, tokoh adat, hingga kelompok pemuda di tingkat lokal merupakan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan bersama. Dengan demikian, keamanan tidak lagi menjadi beban institusi semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif.

Melalui strategi-strategi ini, diharapkan arah kebijakan Polri 2025–2029 dapat benar-benar terimplementasi dalam praktik nyata. Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menguatkan stabilitas nasional sekaligus memperkokoh kepercayaan publik.

D. Peran Masyarakat dan Stakeholders

Keberhasilan transformasi Polri tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal institusi, tetapi juga oleh dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hubungan yang sehat antara Polri dan publik menjadi fondasi utama dalam membangun legitimasi sosial, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan mendapat kepercayaan serta partisipasi nyata dari warga negara.

Pertama, **masyarakat sebagai pengawas sosial**. Dalam era keterbukaan informasi, publik memiliki

peran penting sebagai pengontrol eksternal yang memastikan Polri bekerja sesuai aturan hukum dan etika profesi. Mekanisme pengaduan berbasis digital, partisipasi LSM, hingga peran media massa menjadi sarana check and balance yang membantu mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan pengawasan publik, Polri terdorong untuk lebih transparan dan akuntabel.

Kedua, **masyarakat sebagai mitra keamanan**. Program *community policing* menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menjaga lingkungan. Forum komunikasi polisi-masyarakat, pos keamanan terpadu, hingga kelompok sadar hukum di tingkat desa menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi ini dapat memperkuat rasa aman sekaligus mengurangi angka kriminalitas.

Ketiga, **stakeholders institusional** seperti TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga memegang peran strategis. Sinergi dengan TNI diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman hibrida yang menggabungkan dimensi fisik dan digital. Kerjasama dengan pemerintah daerah memastikan kebijakan keamanan sejalan dengan kebutuhan lokal, sementara kolaborasi dengan dunia akademik membuka ruang riset kebijakan berbasis data.

Keempat, **peran dunia usaha dan teknologi**. Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, dapat menjadi mitra Polri dalam memperkuat infrastruktur

digital dan sistem keamanan siber. Kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) memungkinkan Polri mengakses inovasi teknologi terbaru tanpa terbebani keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang di ruang digital.

Dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, Polri tidak hanya memperluas basis dukungan sosial, tetapi juga menciptakan ekosistem keamanan yang inklusif. Transformasi yang diusung Polri dalam Renstra 2025–2029 dengan demikian bukan sekadar agenda institusional, melainkan gerakan bersama yang menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab kolektif bangsa.

E. Tantangan dalam Implementasi Renstra Polri 2025–2029

Meski arah kebijakan dan strategi Polri dalam Renstra 2025–2029 telah dirumuskan dengan jelas, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan ini, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat menghambat keberhasilan transformasi Polri.

Pertama, Resistensi internal terhadap perubahan.

Transformasi kelembagaan sering kali berhadapan dengan resistensi dari dalam. Sebagian personel mungkin masih nyaman dengan pola kerja lama atau khawatir kehilangan kewenangan ketika mekanisme baru diterapkan. Pola pikir konservatif, budaya birokratis yang kaku, dan adanya kepentingan kelompok dapat memperlambat proses adaptasi. Tantangan ini menuntut kepemimpinan yang tegas, komunikasi yang terbuka, serta program pelatihan berkelanjutan untuk menumbuhkan semangat perubahan.

Kedua, Potensi penyalahgunaan teknologi digital.

Polri tengah mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik, termasuk pemanfaatan big data, kecerdasan buatan (AI), dan sistem pemantauan berbasis sensor. Namun, di balik peluang ini, terdapat risiko penyalahgunaan, baik berupa manipulasi data, bias algoritma, maupun pelanggaran privasi warga. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan regulasi dan etika yang ketat bisa memunculkan masalah baru, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ketiga, Fluktuasi kepercayaan publik akibat kasus tertentu.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat rentan fluktuatif. Satu kasus pelanggaran etika,

penyalahgunaan kewenangan, atau penanganan perkara yang tidak adil dapat langsung menurunkan legitimasi institusi di mata publik. Fenomena ini sering kali diperkuat oleh cepatnya arus informasi di media sosial, sehingga isu negatif lebih mudah menyebar dibandingkan capaian positif. Polri perlu memastikan mekanisme penegakan disiplin internal berjalan transparan, serta membangun strategi komunikasi publik yang proaktif.

Keempat, Keterbatasan anggaran dan disparitas SDM di daerah.

Penerapan kebijakan strategis membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran sering kali membuat program modernisasi teknologi dan penguatan infrastruktur keamanan tidak merata, terutama di wilayah pelosok. Selain itu, terdapat disparitas kemampuan SDM antar-daerah; personel di perkotaan umumnya lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sementara di daerah terpencil masih kesulitan mengikuti ritme perubahan. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pelayanan keamanan yang berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

F. Rekomendasi

Keberhasilan implementasi Renstra Polri 2025–2029 tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan dan strategi yang matang, tetapi juga

pada tindakan nyata yang terarah. Untuk itu, diperlukan upaya sinergis yang menyasar dua ranah utama: **internal Polri** dan **dukungan eksternal** dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Secara internal, upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

Pertama, Perkuat pendidikan integritas sejak tahap rekrutmen. Transformasi Polri sejatinya dimulai dari membentuk aparat yang berkarakter. Oleh karena itu, pendidikan integritas harus menjadi fondasi sejak tahap rekrutmen. Rekrutmen berbasis meritokrasi dengan seleksi ketat memastikan calon anggota Polri memiliki nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan yang menekankan profesionalisme, etika profesi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang adil akan menumbuhkan aparat yang siap menghadapi tantangan modern, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik. Program ini juga membantu membangun budaya anti-korupsi, anti-pungli, dan menumbuhkan kesadaran bahwa integritas bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi reputasi institusi.

Kedua, Tingkatkan kapasitas digital aparat di semua level. Era digital menuntut seluruh jajaran Polri mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Pelatihan dan program pengembangan kapasitas digital harus mencakup seluruh level, mulai dari pusat hingga unit di daerah terpencil. Aparat perlu menguasai sistem manajemen informasi kriminal berbasis big data, aplikasi layanan publik online,

kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta teknologi patroli dan pengawasan berbasis sensor. Peningkatan kapasitas ini bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan analisis data untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Dengan begitu, Polri dapat bekerja lebih prediktif, responsif, dan akurat dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Adapun secara eksternal, upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

Pertama, Dorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja. Masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan Polri bekerja secara efektif dan transparan. Mekanisme partisipatif dapat berupa survei kepuasan publik, forum komunikasi warga-polisi, maupun pengaduan digital yang mudah diakses. Keterlibatan masyarakat membantu Polri menilai sejauh mana kebijakan dan program berjalan sesuai harapan, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan. Partisipasi aktif ini memperkuat legitimasi sosial, sehingga Polri lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Kedua, Transparansi data layanan publik Polri. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik. Polri perlu menyediakan akses terbuka terhadap data layanan publik, termasuk statistik pengaduan, waktu penyelesaian kasus, dan capaian program prioritas. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami proses penegakan hukum dan menilai kinerja aparat secara objektif.

Transparansi juga menjadi alat pencegah praktik penyalahgunaan wewenang, sekaligus menunjukkan komitmen Polri terhadap akuntabilitas dan keadilan.

Ketiga, Sinergi dengan lembaga internasional untuk transfer teknologi keamanan. Dalam menghadapi ancaman transnasional, Polri membutuhkan kapasitas teknologi yang mutakhir. Kerjasama internasional memungkinkan Polri memperoleh transfer teknologi, pelatihan bersama, dan pertukaran informasi intelijen. Sinergi ini meningkatkan kemampuan aparat dalam menanggulangi kejahatan siber, perdagangan narkoba lintas negara, dan ancaman keamanan lainnya. Lebih dari itu, kolaborasi dengan lembaga internasional juga memperluas wawasan strategi penanganan kriminalitas global, sehingga Polri dapat mengantisipasi tren ancaman sebelum berdampak signifikan di tingkat nasional.

Dengan penerapan langkah-langkah internal dan eksternal yang komprehensif ini, Polri memiliki fondasi kuat untuk mewujudkan Renstra 2025–2029 secara efektif. Integritas aparat, kapasitas digital yang merata, partisipasi masyarakat, transparansi layanan, serta kolaborasi internasional menjadi pilar utama yang memastikan Polri tidak hanya modern dan profesional, tetapi juga terpercaya dan dicintai masyarakat.

Penutup

Renstra Polri 2025–2029 menjadi landasan strategis yang menegaskan arah transformasi institusi kepolisian menuju Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Melalui arah kebijakan yang mencakup transformasi digital, penguatan integritas, modernisasi peralatan, kolaborasi multi-sektoral, dan peningkatan pelayanan publik, Polri berupaya menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

Implementasi kebijakan tersebut hanya dapat berhasil apabila didukung oleh strategi yang sistematis dan berkesinambungan. Penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi secara efektif, reformasi struktural dan kultural, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis menjadi faktor penentu keberhasilan. Di sisi lain, tantangan seperti resistensi internal, risiko penyalahgunaan teknologi, fluktuasi kepercayaan publik, dan keterbatasan anggaran menuntut upaya mitigasi yang matang.

Rekomendasi konkret yang menekankan pendidikan integritas sejak tahap rekrutmen, peningkatan kapasitas digital aparat, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja, transparansi data layanan, serta sinergi internasional menjadi pilar penting dalam menyuksekkan Renstra Polri. Melalui langkah-langkah ini, Polri tidak hanya dapat memperkuat keamanan nasional, tetapi juga menumbuhkan legitimasi dan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Renstra Polri 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen kolektif untuk membangun institusi kepolisian yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan implementasinya akan menjadi tolok ukur Polri sebagai institusi yang mampu menghadirkan keamanan, ketertiban, dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.[]